DINAMIKA MASYARAKAT KALTIM DALAM TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Dari Korban menjadi Aktor,

Mungkinkah???

Sri Murlianti
Prodi Pembangunan Sosial -Unmul

TRANSISI ENERGI

- Bagi masyarakat Kalimantan Timur, transisi energi bukan sekadar soal mengganti sumber listrik — melainkan tentang mengganti “way of life”
- Lebih dari tiga dekade, ekonomi dan kehidupan sosial di Kaltim berputar di sekitar industri batubara: dari perusahaan tambang besar, kontraktor lokal, hingga warung, penginapan, dan penyedia catering di pinggir jalan tambang
- Bagaimana nasib manusia di dalam ekosistem energi kotor itu — ketika mesin berhenti berputar?

PROBLEM KETENAGAKERJAAN

- Kaltim menyumbang >55% produksi batubara nasional (270 juta ton/tahun)
- >200.000 pekerja di sektor tambang dan rantai jasa penunjang
- 40% pekerja berasal dari luar daerah, jabatan tinggi didominasi tenaga luar
- Warga lokal mayoritas di level operator dan tenaga kasar

Dimensi Utama	Sub-Tema Dampak	Manifestasi Empiris di Desa-desa Lingkar Tambang	Contoh / Sumber Lapangan
1. Ekonomi & Ketenagakerjaan	1.1 Ketergantungan kerja langsung	Mayoritas warga bekerja sebagai sopir, operator, atau buruh kasar tambang; pekerjaan bersifat kontrak jangka pendek tanpa jaminan sosial.	Long Beleh Modang, Umaq Dian – *Final Report BUMA 2024*
	1.2 Pekerja pendatang & marginalisasi tenaga lokal	Tenaga kerja luar daerah mengisi posisi teknis dan manajerial; warga lokal sulit naik kelas.	Kerta Buana – *Eduvest 2022*
	1.3 Ekonomi ikutan semu	Warung, kontrakan, catering, dan ojek tambang bergantung penuh pada aktivitas tambang; pendapatan anjlok saat produksi turun.	Desa Enggelam, Lamin Telihan – *Final Report BUMA 2024*
2. Politik Lokal & Kekuasaan	2.1 Sistem patronase tambang	Kepala desa, tokoh adat, dan elite lokal menjadi penghubung perusahaan; distribusi peluang kerja dan CSR bersifat personal.	Tenggarong Seberang – *Komunitas 2025*
	2.2 Mafia / makelar ketenagakerjaan	Perekrutan kerja dikuasai calo; muncul pungutan "uang masuk kerja".	Gunung Sari, Long Beleh Modang – *Final Report BUMA 2024*
	2.3 Ketergantungan fiskal desa	PAD desa bersumber dari donasi tambang; desa kehilangan kemandirian anggaran.	Beberapa desa di Kukar – *Final Report BUMA 2024*

Taksonomi

Dampak

Ketergantungan

Desa-Desa

Lingkar Tambang Batubara

3. Sosial-Kultural & Pendidikan	3.1 Pergeseran orientasi nilai	Anak muda meninggalkan sekolah karena tergiur gaji cepat dari tambang; pendidikan tidak lagi dilihat sebagai mobilitas sosial.	Kerta Buana, Tenggarong Seberang – *Komunitas 2025*
	3.2 Disintegrasi sosial	Pola gotong royong melemah; relasi antarwarga didominasi uang dan proyek; meningkatnya konflik antar kelompok kerja.	Umaq Dian, Enggelam – *Final Report BUMA 2024*
	3.3 Degradasi moral & sosial	Meningkatnya konsumsi alkohol, prostitusi, dan kekerasan domestik akibat pergeseran ekonomi cepat.	Long Beleh Modang – *Final Report BUMA 2024*
4. Lingkungan & Ekologi Sosial	4.1 Kerusakan fisik lingkungan	Lubang tambang tidak direklamasi, pencemaran air, tanah longsor, dan debu batu bara.	Samarinda, Kukar, Paser – *JATAM 2023*
	4.2 Kelangkaan air & gagal pertanian	Irigasi rusak, air tanah tercemar; petani kehilangan sumber air bersih dan sawah mengering.	Enggelam, Lamin Telihan – *Final Report BUMA 2024*
	4.3 Ketergantungan ekologis	Warga terbiasa menerima bantuan air dan listrik dari perusahaan; kemandirian lingkungan hilang.	Long Beleh Modang – *Final Report BUMA 2024*

5. Kesehatan & Keamanan Sosial	5.1 Penyakit akibat tambang	ISPA, penyakit kulit, stres sosial meningkat di sekitar area tambang.	Kukar, Samarinda – *Final Report BUMA 2024*
	5.2 Ketidakpastian masa depan sosial	Masyarakat hidup dalam "ekonomi sementara" yang akan runtuh saat tambang tutup; muncul kecemasan kolektif.	Semua desa lingkar tambang – *Final Report BUMA 2024*

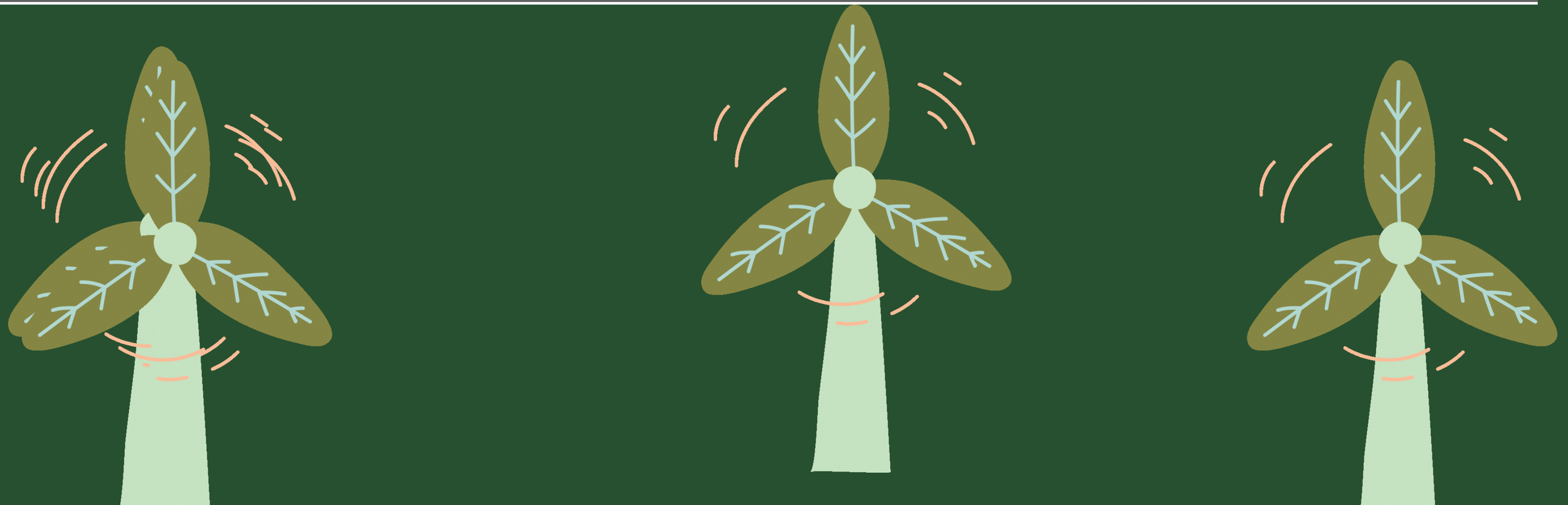

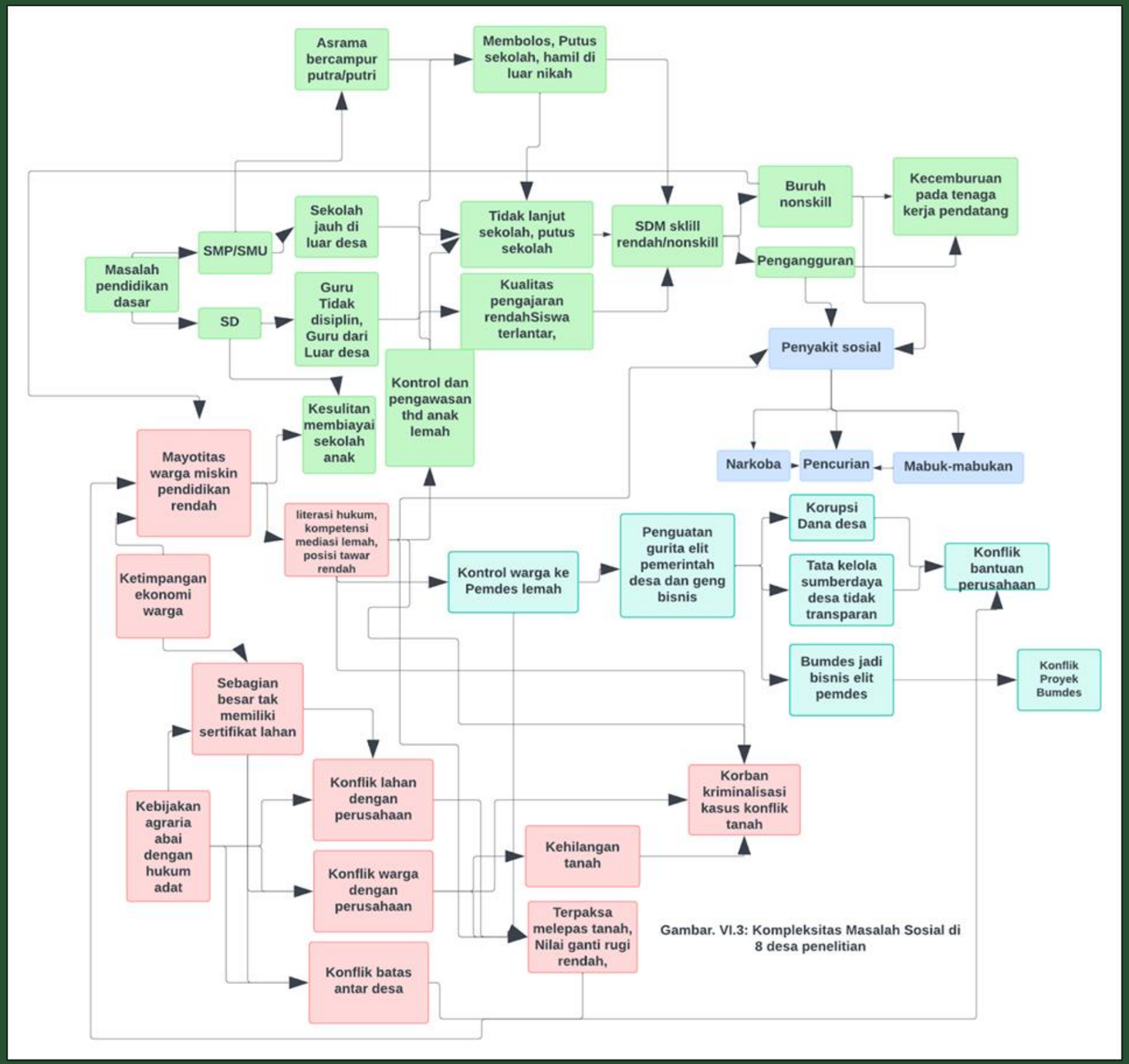

Gambar. VI.3: Kompleksitas Masalah Sosial di 8 desa penelitian

Kompleksitas Masalah Sosial Desa-Desa Lingkar Tambang

Taksonomi Pemulihan Desa-Desa Lingkar Tambang

di Era Transisi Energi

1. Ekonomi & Ketenagakerjaan Baru	1.1. *Re-skilling* dan *up-skilling* pekerja tambang ke sektor hijau (energi surya, pertanian organik, reklamasi, industri daur ulang). 1.2. Pengembangan koperasi tenaga kerja pasca tambang.	Dukungan pelatihan vokasional, insentif BLK hijau, kemitraan CSR transisi energi.	Dinas Tenaga Kerja, BUMDes, kampus lokal, perusahaan tambang (program transisi).
2. Revitalisasi Pertanian & Kedaulatan Pangan Lokal	2.1. Pemanfaatan lahan reklamasi untuk agroforestri dan pertanian regeneratif. 2.2. Rehabilitasi irigasi dan sumber air desa. 2.3. Diversifikasi tanaman lokal bernilai ekonomi tinggi.	Jaminan hak atas lahan pasca tambang, penyediaan bibit dan pendamping teknis.	Kementan, BRGM, Dinas Pertanian, komunitas petani muda.
3. Diversifikasi Ekonomi Desa & UMKM Hijau	3.1. Pendirian *eco-enterprise* berbasis desa (produk hijau, energi mikro, wisata edukasi tambang) 3.2. Penguatan BUMDes untuk menjadi pelaku ekonomi transisi.	Akses modal mikro, pelatihan kewirausahaan, jejaring pasar lokal–nasional.	BUMDes, Dinas Koperasi & UMKM, lembaga mikrofinans, CSO lokal.
4. Restorasi Ekologi & Infrastruktur Lingkungan	4.1. Reklamasi kolaboratif: menutup lubang tambang, menanam kembali, membangun sistem air desa 4.2. Instalasi panel surya desa & sistem energi bersih lokal. 4.3. Pemulihan DAS dan lahan kritis.	Peraturan daerah tentang tanggung jawab reklamasi bersama, dana rehabilitasi perusahaan dialihkan ke komunitas.	KLHK, Dinas Lingkungan, perusahaan tambang, LSM lingkungan, universitas.

English (United States) Focus

5. Pendidikan & Regenerasi Sosial	5.1. Kurikulum lokal “Sekolah Energi dan Ekologi”. 5.2. Beasiswa bagi anak pekerja tambang untuk studi di bidang energi hijau. 5.3. Program literasi hijau bagi perempuan & pemuda desa.	Kolaborasi antar sekolah, CSR pendidikan, dukungan kampus dan lembaga pelatihan.	Dinas Pendidikan, kampus, organisasi pemuda, CSR perusahaan.
6. Reformasi Tata Kelola & Transparansi Desa Tambang	6.1. Penghapusan sistem patronase dalam distribusi CSR dan peluang kerja. 6.2. Audit sosial dan forum partisipatif warga dalam perencanaan desa. 6.3. Integrasi *data livelihood* ke dalam RPJMDes.	Aturan keterbukaan informasi, pendampingan masyarakat sipil, digitalisasi anggaran desa.	Pemerintah desa, Bappeda, CSO, media lokal, perguruan tinggi.
7. Keadilan Restoratif & Pengakuan Korban Sosial-Ekologis	7.1. Skema *Community Restoration Fund* untuk korban dampak tambang.7.2. Pengakuan formal terhadap wilayah rusak dan komunitas terdampak sebagai prioritas pemulihan.7.3. Upaya dokumentasi sejarah lokal tambang dan penyembuhan sosial.	Dukungan hukum, basis data korban, kolaborasi akademisi–aktivis.	Pemerintah provinsi, lembaga adat, CSO lingkungan, universitas, media.

4 DIMENSI KEADILAN DALAM TRANSISI ENER

Keadilan distribusi – siapa yang menanggung beban dan siapa yang menikmati manfaat.

Keadilan prosedural – siapa yang diajak bicara dalam penyusunan kebijakan.

Keadilan pengakuan – siapa yang diakui sebagai pihak terdampak (perempuan, pekerja informal, dan masyarakat adat).

Keadilan restoratif – siapa yang memulihkan kerusakan sosial dan ekologis.
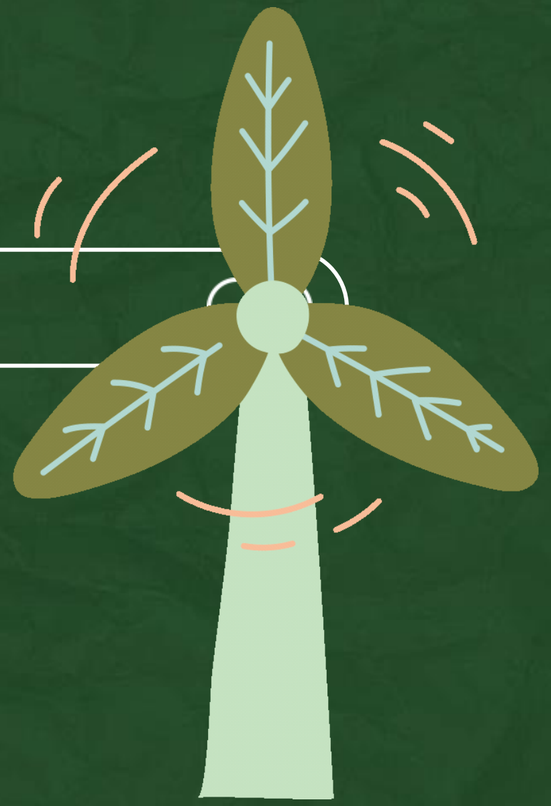
Penutup